



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 10);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang tahun 2022 oleh Inspektorat Kota Padang, Indikator Kinerja Utama Kota Padang perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Tahun 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 70 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 70);
- b. Nomor 10 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 10);

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

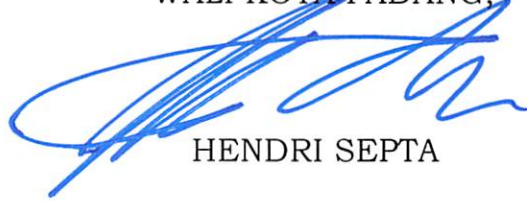
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Oktober 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata lama sekolah	<i>rata – rata lama sekolah pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan lama sekolah	<i>rata – rata harapan lama sekolah pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	<i>Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</i>	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	$\frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek dalam suatu wilayah dan periode tertentu}}{\text{Jumlah balita yang diukur panjang badan/tinggi badan dalam suatu wilayah dan periode tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki – laki}} \times 100\%$	DP3AP2KB
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	<i>Pengeluaran perkapita pada tahun n</i>	Bappeda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan (nilai)	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan pada tahun n</i>	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Yang Layak	$\frac{\text{Luas Perumahan dan Permukiman Layak}}{\text{Luas Perumahan dan Permukiman Kota Padang}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	<i>Angka Kriminalitas pada tahun n</i>	Satpol PP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun n</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	<i>Luas Kawasan kumuh yang ditangani pada tahun n</i>	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
10.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin pada tahun } n}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	Dinas Sosial, Bappeda
		PDRB Per-kapita (ADHB)	$\frac{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bappeda
11.	Meningkatnya Investasi	Peningkatan nilai PMA (US \$)	<i>Jumlah nilai PMA (US \$) pada tahun n</i>	DPMPTSP
		Peningkatan nilai PMDN (juta rupiah)	<i>Jumlah nilai PMDN (juta rupiah) pada tahun n</i>	DPMPTSP
12.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor perdagangan}}{\text{Jumlah Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
13.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (tahun } n) - \text{jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif}(n - 1)}{\text{jumlah pelaku usaha kreatif tahun } n} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
14.	Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan Pariwisata Kota Padang}}{\text{Jumlah kunjungan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
15.	Meningktanya Kualitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	<i>Jumlah kunjungan wisata mancanegara pada tahun n</i>	Dinas Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	<i>Jumlah kunjungan wisata domestik pada tahun n</i>	Dinas Pariwisata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	$\frac{\text{Jumlah total hari wisatawan mancanegara}}{\text{Jumlah wisatawan mancanegara}}$	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik	$\frac{\text{Jumlah total hari wisatawan domestik}}{\text{Jumlah wisatawan domestik}}$	Dinas Pariwisata
16.	Meningkatnya Kemampuan penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah kelurahan tangguh dan tanggap bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	BPBD
17.	Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya	Persentase Bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100\%$	Dinas Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
18.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	<i>Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</i>	BPKAD, Inspektorat
19.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	<i>Nilai SAKIP Kota Padang pada tahun n</i>	Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi
		Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	<i>Nilai laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun n</i>	Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total unsur yg terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Bagian Organisasi
		Indeks Kemudahan Perizinan daerah	<i>Indeks Kemudahan Perizinan Daerah pada tahun n</i>	DPMPTSP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<i>Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun n</i>	Dinas Kominfo

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA